

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang di hadapi oleh banyak negara yang menyangkut kesejahteraan masyarakat adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut di sebabkan karena masih tingginya angka kemiskinan yang sehingga membatasi mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan seolah menjadi raksasa menakutkan bagi semua pihak. Kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk di kaji secara terus-menerus, bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan hingga kini kemiskinan belum bisa dientaskan. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang di anggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu.

Pada kondisi saat ini, tingkat kemiskinan bukan hanya di pandang dari rendahnya kualitas ekonomi, tapi sudah di pandang dari sudut yang berbeda-beda dan tergantung pandangan yang di gunakan maka batasan kemiskinan juga telah bergeser. Dalam arti yang luas kemiskinan merupakan mampu bekerja atau berusaha namun tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap

pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.¹

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensial. Seperti halnya dimensi sosial dan dimensi ekonomi. Dimensi sosial berhubungan dengan stratifikasi sosial atau perbedaan lapisan masyarakat antara yang kaya dan miskin, sedangkan dimensi ekonomi berhubungan dengan pendapatan individu dan perekonomian suatu negara.

Negara Indonesia mempunyai tanggung jawab kemiskinan karena hal ini merupakan amanah konstitusi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 34 (1) yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.” Ketentuan ini telah diperjelas lagi dalam Undang-Undang No.13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dimana negara mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan fakir miskin dan keluarganya.

Sejalan dengan kewajiban tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah di arahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif mempunyai kemiskinan yang fluktuasi naik dan turun dari tahun ke tahun. Penurunan jumlah penduduk miskin merupakan indikator pertama dalam keberhasilan pembangunan.

Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan, permasalahan kemiskinan adalah

¹ Defi Arfiani, *Berantas Kemiskinan*, (Semarang : ALPRIN 2009), h.6.

suatu masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya untuk pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Nasir dkk.,2008)².

Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing. Pembangunan sendiri dapat di artikan sebagai upaya yang di lakukan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah di peroleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang, dari periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat (Sadono Sukirno, 2005).

Pemerintah telah banyak memuat kemajuan untuk memulihkan stabilitas makroekonomi. Berbagai kegiatan

²Nasir, M., Muh, Saichudin dan Maulizar , “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Purworejo” Jurnal Eksekutif. Vol. 5, No. 4 (Agustus 2008).

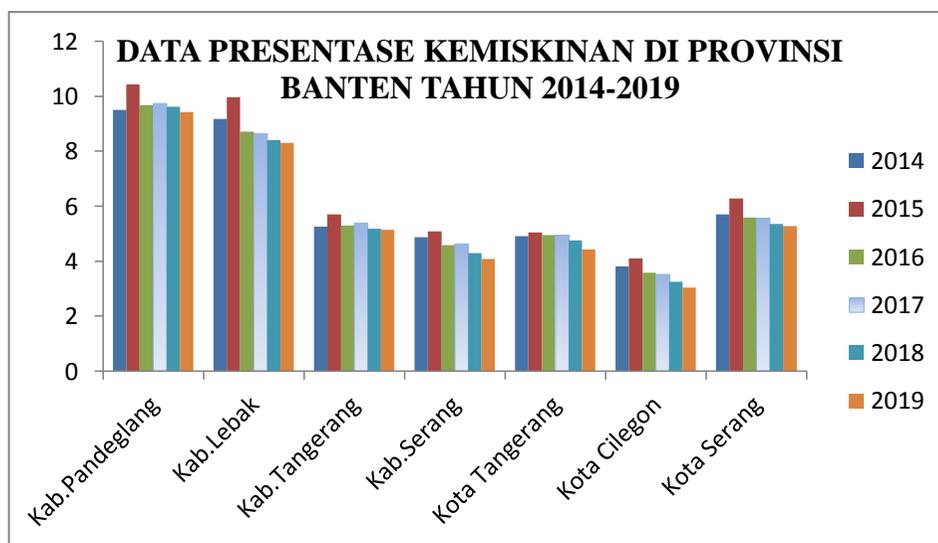
pembangun nasional juga dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satunya dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan ke daerah-daerah, khususnya pembangunan pada daerah yang relatif memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Namun demikian, masih banyak yang perlu dilakukan untuk kembali menggerakkan perekonomian dan membangun basis bagi pemulihan yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan upah, mengurangi kemiskinan dan memastikan adanya kesempatan yang sama.

Sampai dengan saat ini pemerintah terus mengembangkan beberapa kegiatan yang sangat terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Kontribusi yang diberikan oleh masing-masing kegiatan terhadap penurunan angka kemiskinan beragam. Penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berupaya dengan melaksanakan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program belum menampakkan hasil yang optimal.

Rencana dengan pencapaian tujuan masih terjadi kesenjangan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis harus diperlukan sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

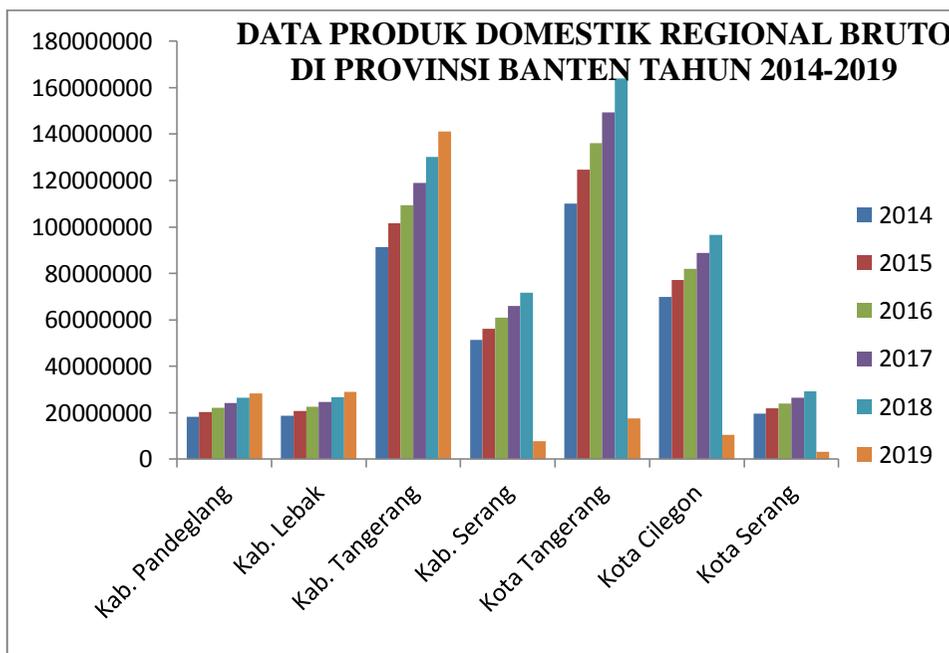
Pemerintah Provinsi Banten memiliki permasalahan yang tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang di hadapi oleh pemerintahan pusat, yaitu tingginya angka kemiskinan. Untuk saat

ini pemerintah Provinsi Banten secara bertahap telah melakukan berbagai program untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.



Sumber : BPS Provinsi Banten

Dalam hal tersebut masalah kemiskinan di Provinsi Banten, sangat perlu di perhatikan kondisi kemiskinan di masing-masing daerah, yaitu kemiskinan yang ada pada kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Banten. Terjadinya fluktuasi jumlah penduduk miskin di kabupaten dan kota di Provinsi Banten dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Dengan masih adanya perbedaan tingginya jumlah penduduk miskin yang ada di kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan tersebut, terlebih dahulu perlu di ketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten antara lain (1) Pertumbuhan ekonomi; dan (2) Upah Minimum.



Sumber : BPS Provinsi Banten

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mempunyai keterkaitan yang erat, Pertumbuhan ekonomi sering kali dijadikan tolak ukur kinerja perekonomian suatu wilayah, akan tetapi belum pasti tingginya pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingginya juga tingkat kesejahteraan rakyatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi sangat berarti bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi.

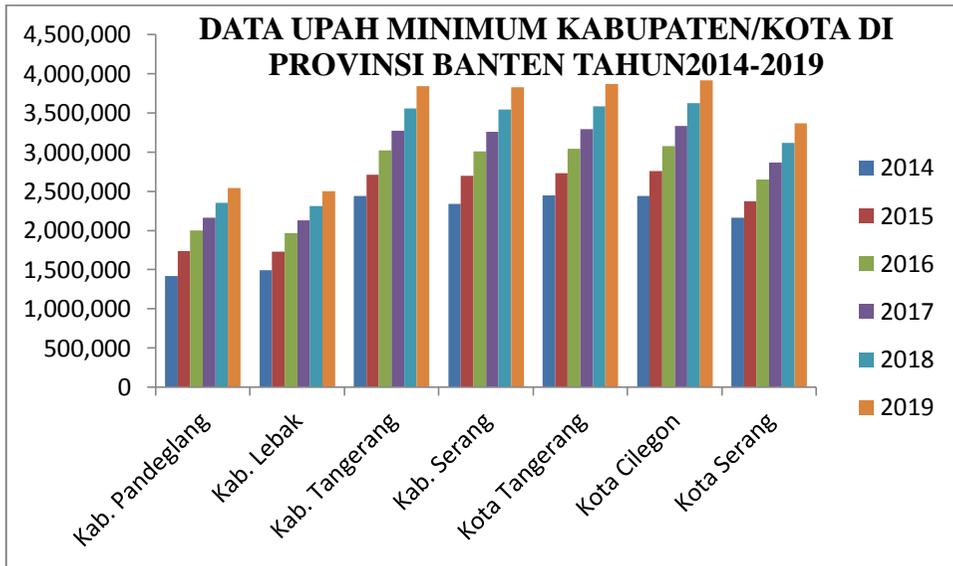
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Banten di gunakan untuk mengukur kinerja pekonomian dari tahun ke tahun, sehingga arah perekonomian akan lebih jelas. PDRB juga untuk mengatur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai

perencanaan dan pengambilan keputusan yang salah satunya untuk mengurangi kemiskinan.

Selain pertumbuhan ekonomi, kebijakan upah minimum juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999, Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu.

Kebijakan penetapan upah minimum oleh pemerintah adalah kebijakan yang diterapkan dengan tujuan sebagai jaring pengaman terhadap pekerja atau buruh agar tidak dieksploitasi dalam bekerja dan mendapat upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM). Jika kebutuhan hidup minimum dapat terpenuhi, maka kesejahteraan pekerja meningkatkan dan terbebas dari masalah kemiskinan.

Peraturan Menteri Nomor 17, tahun 2005 (Per-17/Men/VIII/2005), KHL merupakan standar kebutuhan yang harus dipenuhi seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak, baik fisik, non fisik, dan sosial selama satu bulan. Seorang pekerja dianggap hidup layak jika upahnya mampu memenuhi kebutuhan 3000 kalori per hari. Oleh karena itu, KHL menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan upah minimum.



Sumber : BPS Provinsi Banten

Upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak di maksudkan untuk melindungi kesejahteraan pekerja. Upah minimum di harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan upah rendah. Jika efektif upah minimum dapat di gunakan sebagai salah satu alat untuk mengurangi angka kemiskinan karena dapat membantu penduduk miskin keluar dari kemiskinan. Tingkat upah minimum Provinsi dijadikan sebagai dasar dalam penetapan upah minimum Kota/Kabupaten yang belum bisa menetapkan upah minimum daerahnya. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, di Provinsi Banten dalam periode 2014-2019 terjadi fenomena penurunan tingkat kemiskinan. Namun, belum meratanya hasil usaha pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan, padahal dampak kemiskinan sangat buruk terhadap perekonomian. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi tingkat kemiskinan , sehingga dapat digunakan sebagai dasar kebijakan dalam usaha mengatasi kemiskinan di Banten.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “ **Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2014-2019** ”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Tingkat kemiskinan di Banten masih tinggi.
2. Berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di Banten.

C. Batasan Masalah

Permasalahan yang dibatasi dalam penelitian ini yang terkait dengan kemiskinan adalah tingkat PDRB dan upah minimum yang digunakan adalah data Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada tahun 2014 sampai tahun 2019.

D. Perumusan Masalah.

Berdasarkan masalah yang telah di jelaskan sebelumnya maka di tarik masalah untuk menganalisis “Pengaruh PDRB dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di provinsi Banten tahun 2014-2019” sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten?

2. Bagaimana Pengaruh Upah Minimum terhadap Kemiskinan ?
3. Bagaimana pengaruh PDRB dan Upah Minimum secara bersama terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten
4. Bagaimana pandangan Islam terhadap PDRB, Upah Minimum dan Kemiskinan ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten?
2. Untuk menganalisis Upah Minimum terhadap Kemiskinan ?
3. Untuk menganalisis PDRB dan Upah Minimum secara bersama terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten
4. Untuk menelaah pandangan Islam terhadap PDRB, Upah Minimum dan Kemiskinan ?

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penulisan ini antara lain :

1. Bagi penulis

Merupakan suatu pembelajaran yaitu menganalisis suatu pengaruh PDRB dan Upah Minimum terhadap kemiskinan, sehingga penulis dapat mempraktikan teori yang di dapat selama di perkuliahan dengan menganalisa dan memecahkan masalah.

2. Bagi pihak lain.

Di harapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi dalam menanggulangi kemiskinan. Dan sebagai bahan referensi penelitian lain, Pagaruh PDRB dan upah minimum terhadap kemiskinan di Banten.

G. Penelitian Terdahulu

Sebagai pembuatan skripsi ini, penulis banyak melihat penelitian-penelitian terdahulu yang telah ada, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan Dio Syahrullah (2014) dengan judul “Analisis Pengaruh Produk Regional Bruto (PDRB), Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2009-2012”. Penelitian Dio tersebut mencoba menguji seberapa besar pengaruh variabel produk domestik regional bruto (PDRB), pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi Banten tahun 2009-2012. Dan hasil penelitian tersebut menunjukkan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, pendidikan tidak signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dan keseluruhan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Banten³.

Penelitian yang dilakukan Asriani Kurnia Ningrum (2014) dengan judul “Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pengangguran, Kesehatan, Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)”.

Penelitian Kurnia tersebut mencoba menguji seberapa besar pengaruh upah minimum, pengangguran, kesehatan dan pendidikan terhadap kemiskinan. Dan hasil penelitian tersebut menunjukkan upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

³Dio Syahrullah, *Analisis Pengaruh Produk Regional Bruto (PDRB), Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2009-2012*, skripsi, (Banten : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

kemiskinan, pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, kesehatan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, pendidikan tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan⁴.

Penelitian Priyo Adi Nugroho (2015) dengan judul “ Pengaruh Pdrb, Tingkat Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kota Yogyakarta Tahun 1999-2013”. Penelitian Priyo tersebut mencoba menguji bagaimana pengaruh variabel produk domestik regional bruto (PDRB), tingkat pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 1999-2013. Dan hasil penelitian tersebut menunjukkan PDRB berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dan keseluruhan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota Yogyakarta⁵.

Penelitian Fitriani (2016) dengan judul “ Analisis Pengaruh Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Aceh ”. Penelitian Fitriani tersebut mencoba menguji bagaimana pengaruh variabel upah minimum, dan tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi

⁴Asriani Kurnia Ningrum, *Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pengangguran, Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)*, Skripsi, (Jawa tengah : Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014).

⁵Priyo Adi Nugroho, *Pengaruh Produk Regional Bruto (PDRB), Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 1999-2013*, Skripsi, (DIY : Univesitas Negeri Yogyakarta, 2015).

Aceh. Dan hasil penelitian tersebut menunjukkan upah minimum berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin dan pengangguran berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin dan keseluruhan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh.⁶

Penelitian Dita Sekar Ayu (2019) dengan judul “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, Ipm, Jumlah Penduduk Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015”. Penelitian Sekar tersebut mencoba menguji bagaimana pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015. Dan hasil penelitian tersebut menunjukkan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, TPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penduduk miskin.⁷

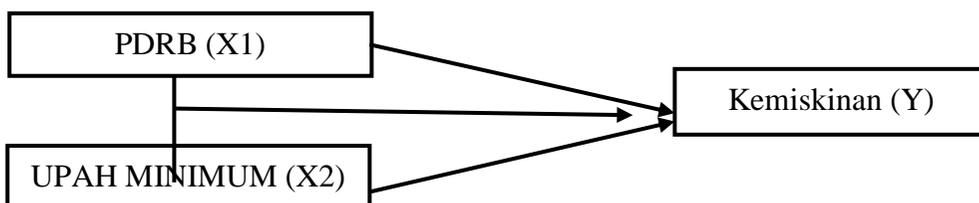
⁶Fitriani, *Analisis Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Aceh*, Skripsi, (NAD : Universitas Meulaboh Aceh Barat,2016)

⁷Dita Sekar Ayu, *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015*, Skripsi, (Jawa Timur : Univesitas Islam Indonesia,2018)

H. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa kemiskinan di pengaruhi oleh dua variabel pembangunan ekonomi, antara lain laju PDRB dan Upah Minimum. PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Upah minimum sebagai pendapatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kedua variabel tersebut merupakan variabel independen, bersama-sama dengan kemiskinan sebagai variabel dependen akan di regresi untuk mendapatkan tingkat signifikansi setiap variabel independen tersebut diharapkan mampu mempengaruhi kemiskinan.

Selanjutnya tingkat signifikansi setiap variabel tersebut di harapkan mampu memberikan gambaran kepada pemerintah dan pihak yang terkait mengenai penyebab kemiskinan di Provinsi Banten untuk dapat merumuskan suatu kebijakan yang relevan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Maka skema kerangka pemikiran dapat di gambarkan sebagai berikut:



Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini yaitu PDRB (Variabel X1) dan Upah Minimum (Variabel X2). Variabel Dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi

akibat, karena adanya variabel bebas. Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kemiskinan (Variabel Y). Berdasarkan gambar diatas, penulis akan meneliti tentang Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten, untuk mengetahui apakah Kemiskinan (Y) dipengaruhi atau tidak oleh variabel PDRB (X1) dan Upah Minimum (X2).

I. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian yang akan dilaksanakan. Hipotesis dirumuskan dalam kalimat pernyataan, bukan kalimat tanya. Hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu hubungan, sebab akibat dari kinerja variabel yang perlu dibuktikan kebenarannya.⁸

H₀ : Diduga secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten.

H₁ : Diduga secara bersama-sama terdapat pengaruh antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penjelasan, pemahaman pokok permasalahan yang akan dibahas, maka penulis menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

⁸Nihayatul Masykuroh, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Serang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,2018), h.47

Bab ke-satu pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikasi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangkapemikiran, hipotesis dan sistematika pembahasan.

Bab ke-dua tinjauan pustaka, bab kedua ini penulis menempatkan landasa teori dengan bergumen bahwa tinjauan pustaka digunakan untuk mendukung penyusunan teori dan konsep dari judul penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, meliputi: pengertian produk domestik regional bruto dan upah minimum terhadap kemiskinan dan pada bagian ini juga disajikan hubungan antar variabel. Bab ke-tiga metodologi penelitian, dalam bab ini akan diuraikan mengenai sumber data, definisi variabel, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan teknis analisis data.

Bab ke-empat hasil dan pembahasan, berisi tentang hasil penelitian secara sistematika, kondisi objekif provinsi banten serta di analisis dengan menggunakan metodologi penelitian yang ditetapkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh produk domsetik regional bruto dan upah minimum terhadap kemiskinan.

Ban ke-lima penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dan saran.